



Optimalisasi Pelayanan Publik, Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Pada Kantor Kecamatan Blimbing Kota Malang

Rifatul Imania^{1*}, Septi Virgie Amelia Farazizah²

¹⁻² Program Studi Manajemen, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

*Penulis Korespondensi: rifatulimania731@gmail.com, farazizahsepti@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze and improve the public service system and financial management at the Blimbing District Office. The main issues identified are the low efficiency of service processes and the lack of transparency in budget recording and utilization. A descriptive qualitative approach was applied using interviews, observations, and documentation. The findings indicate that several aspects of service delivery need improvement, such as service speed, utilization of information technology, and human resource competency. In terms of financial management, a more transparent and digital-based reporting system is required to support accountability. The study recommends staff training, the implementation of online service systems, and the strengthening of internal financial controls. Enhancing these two aspects is expected to improve public satisfaction and the overall effectiveness of the district office's operations.*

Keywords: *Public service, Financial Management, Budget*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperbaiki sistem layanan publik serta pengelolaan keuangan dan anggaran di Kantor Kecamatan Blimbing. Masalah utama yang ditemukan adalah rendahnya efisiensi dalam proses pelayanan serta kurangnya transparansi dalam pencatatan dan pemanfaatan anggaran. Metode yang diaplikasikan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa aspek pelayanan yang perlu ditingkatkan, seperti kecepatan layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta kompetensi sumber daya manusia. Dari segi finansial, diperlukan sistem pelaporan yang lebih transparan dan berbasis digital guna mendukung akuntabilitas. Saran dari penelitian ini meliputi pelatihan karyawan, penerapan sistem pelayanan daring, serta penguatan kontrol internal dalam pengelolaan keuangan. Peningkatan dua aspek ini diharapkan dapat memperbaiki kepuasan masyarakat serta efektivitas kerja kantor kecamatan.*

Kata Kunci : *Pelayanan publik, Pengelolaan Keuangan, Anggaran*

1. LATAR BELAKANG

Kantor kecamatan sebagai lembaga pelaksana pemerintahan di tingkat kecamatan memiliki peranan krusial dalam memberikan layanan publik yang efektif dan efisien kepada masyarakat. Pelayanan yang berkualitas merupakan indikator utama kesuksesan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara pengelolaan keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi dasar bagi terwujudnya pemerintahan yang bersih. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat banyak kantor kecamatan yang mengalami berbagai masalah terkait efisiensi pelayanan dan keterbukaan keuangan. Kecamatan Blimbing adalah salah satu kecamatan yang saat ini berusaha memperbaiki kualitas layanan dan pengelolaan keuangannya. Permasalahan seperti

lambatnya proses pelayanan, minimnya pemanfaatan teknologi, dan lemahnya sistem pelaporan keuangan tetap menjadi kendala utama. Maka dari itu, perlu diambil tindakan strategis untuk mengoptimalkan kedua hal tersebut demi menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan pengelolaan keuangan yang lebih teratur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis situasi pelayanan serta sistem keuangan yang ada di Kantor Kecamatan Blimbing dan merumuskan langkah-langkah optimalisasi yang dapat diterapkan.

2. KAJIAN TEORITIS

Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah jenis layanan yang disediakan oleh lembaga pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar serta hak-hak sipil (Sinambela, 2018). Menurut Lovelock (2011), layanan yang baik ditandai dengan kecepatan, akurasi, kemudahan akses, dan kepuasan konsumen. Dalam konteks pemerintahan lokal, pelayanan publik harus memiliki sifat yang transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peningkatan pelayanan publik memerlukan dukungan dari SDM yang berkualitas serta penggunaan teknologi informasi (Dwiyanto, 2006).

Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah seluruh hak dan kewajiban yang dimiliki daerah yang dapat diukur dengan uang serta berbagai bentuk kekayaan daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan (Permendagri No. 77 Tahun 2020). Menurut Mardiasmo (2009), pengelolaan keuangan daerah yang efektif dicirikan oleh adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kedisiplinan anggaran. Di era digital, penerapan sistem informasi keuangan daerah (SIKD) menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi dan pengawasan terhadap anggaran pemerintah.

Manajemen Keuangan

Selanjutnya menurut Sutrisno (2012:3) Manajemen keuangan yaitu semua aktivitas usaha yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan menghasilkan dana tersebut secara efisien. Sedangkan Menurut Fahmi (2014:2) manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji dan menganalisis tentang

bagaimana seseorang manajer keuangan dengan menggunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana dengan tujuan mampu memberikan profit atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan keberlanjutan usaha bagi perusahaan. Menurut Sutrisno (2020:3) manajemen keuangan atau sering disebut pembelanjaan dapat diartikan sebagai semua aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha-usaha mendapatkan dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk menggunakan dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Menurut Abdul Halim dan Sarwoko (2019:3) manajemen keuangan adalah pengelolaan uang dalam suatu organisasi, apakah itu organisasi pemerintah, sekolah, rumah sakit, bank, perusahaan dan lain-lain. Menurut Agus Sartono (2020:1) Manajemen keuangan adalah sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembayaran investasi atau pembelanjaan secara efisien.

Anggaran

Menurut Rangga *et al.*, (2020:204) Penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumber daya, karena keterbatasan dana yang dimiliki oleh Pemerintah. Menurut M.Fuad dkk (2020:2) mendefinisikan bahwa Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup kegiatan seluruh perusahaan untuk suatu periode tertentu di masa depan. Menurut Suhardi (2019:3) Budget dapat diartikan anggaran, yaitu merupakan suatu rencana yang disusun oleh perusahaan bisnis/jasa secara sistematis dan terperinci, yang dinyatakan dalam bentuk kuantitatif berupa unit/satuan moneter, atau bisa juga dalam bentuk satuan barang/jasa yang berlaku, pada periode tertentu di masa mendatang. Menurut Sasongko & Parulian (2020:2) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jualnya untuk tahun depan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Anggaran adalah rencana keuangan yang disusun secara sistematis dan terperinci Anggaran merupakan alat penting bagi manajemen dalam perencanaan, pengalokasian sumber daya, pengendalian, dan evaluasi kinerja.

Pengelolaan Keuangan

Pengertian pengelolaan keuangan daerah menurut Peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu: “pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Secara harafiah pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) berasal dari kata manajemen yang memiliki arti mengelola dan keuangan yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan uang seperti pembiayaan, investasi dan modal. Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan bagaimana mengelola keuangan yang dimulai memperoleh sumber pendanaan, menggunakan dana sebaik mungkin hingga mengalokasikan dana pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan (Armereo *et al.*, 2020:1). Pengelolaan keuangan menurut (Yusanti 2020) adalah kegiatan pengelolaan uang dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki tujuan supaya memperoleh kesejahteraan keuangan. Sedangkan menurut Kholifah dan Iramani (2013) dalam (Yusanti 2020) pengelolaan keuangan keluarga adalah kemampuan seseorang dalam mengatur perencanaan, penganggaran, pencarian, pengelolaan, pemeriksaan, dan penyimpanan uang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan Pengelolaan keuangan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap aktivitas keuangan, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun organisasi, termasuk pemerintah daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah ini merupakan penyatuan laporan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada pemerintah yang disesuaikan dengan kerangka konsep yang ada pada Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 paragraf 24 yang mana penyusunannya diperuntukan ketersediaan informasi yang relevan berkenaan dengan posisi keuangan serta keseluruhan transaksi yang dilakukan perusahaan yang memberikan laporan keuangan pada periode yang telah ditentukan.

Menurut Sinurat (2018:117) bahwa Laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisikan terkait posisi keuangan dan juga sejumlah transaksi yang dilakukan oleh

suatu entitas. Laporan keuangan ini memiliki tujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Menurut Sujarweni (2019) analisis laporan keuangan adalah upaya untuk menganalisis kondisi keuangan entitas, hasil kerja entitas pada masa lalu & estimasi masa mendatang untuk mengetahui kinerja entitas hingga saat ini dan mengestimasi pada waktu ke depan. Lebih lanjut pengertian menurut Subramanyam (2019) analisis laporan keuangan merupakan penerapan alat dan teknik untuk menganalisis laporan keuangan dengan data relevan yang mempunyai tujuan umum yang berguna untuk menghasilkan estimasi dan kesimpulan yang dapat digunakan dalam analisis bisnis.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai kondisi pelayanan publik dan pengelolaan keuangan di Kantor Kecamatan Blimbing. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Subjek penelitian terdiri dari staff bagian pelayanan, bendahara serta masyarakat yang pernah mengakses layanan kecamatan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses pengelolaan administrasi keuangan yang dilakukan oleh bagian keuangan diantaranya adalah pencatatan transaksi/kejadian keuangan, input data keuangan, pengeluaran serta pembuatan laporan keuangan. proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari proses perencanaan, yang meliputi musrembang, renstra, renja, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana kerja anggaran. Proses penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan tidak mengalami masalah sehingga dapat membantu pengelolaan keuangan yang berbasis akrual efisien, efektif, dan sistematis. Sedangkan yang bermasalah adalah pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran di kecamatan Blimbing yang belum optimal di sebabkan kurangnya kualitas SDM yang memiliki kemampuan atau keterampilan berbasis akrual dalam pemanfaatan teknologi informasi yang sudah ada dan ketidak sesuaian waktu dalam pelaporan keuangan setiap tahun.

Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Blimbing melewati beberapa prosedur sebagai berikut:

1. Perencanaan penganggaran

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Proses perencanaan dan penganggaran pada kantor Camat Blimbing berdasarkan kebutuhan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), dokumen pelaksanaan anggaran, rencana kerja anggaran mulai dari tingkat Desa, kelurahan, kecamatan serta tingkat Kabupaten.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informasi diatas dapat disimpulkan yang terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran keuangan pada kantor Camat Blimbing yaitu Camat selaku pengguna anggaran, sekretaris camat, PPK-SKPD (Pejabat Penatausahaan Keuangan - Satuan Kerja Perangkat Daerah), bendahara barang dan bendahara.

2. Pelaksanaan dan Penatausahaan

Perencanaan anggaran dengan penggunaan anggaran pada kantor Camat Blimbing yaitu Perencanaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sehingga dari DPA itu menjadi acuan dalam rangka menjalankan program dan kegiatan yang berhubungan dengan bendaharaan dan biaya.

3. Pencairan

- a. Dalam mengurus pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Blimbing yaitu bendahara, bendahara pembantu dan Kasubag Program dan Keuangan atau disebut Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) mulai dari penginputan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban),
- b. Setelah Surat Pertanggung Jawaban Administratif dan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional di input kemudian diverifikasi oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan atau di sebut sebagai PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan), setelah diverifikasi kemudian di tanda tangani oleh Camat selaku Pengguna Anggaran dan bendahara sebagai pembuat laporan.

- c. Setelah semua lengkap kemudian di setor ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah) sebagai salah satu syarat untuk bisa mengajukan SPP (Surat permintaan Pembayaran),
- d. Setelah itu bendahara sudah bisa membuat Surat Permintaan Pembayaran sejumlah nominal yang tertera di Surat Pertanggung Jawaban Fungsional serta Untuk permintaan SPP GU (Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang). Akan tetapi untuk permintaan SPP TU (Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang) prosesnya sama yaitu harus melampirkan Surat Pertanggung Jawaban Fungsional bulan berjalan tetapi untuk nominal tidak ditentukan tergantung berapa jumlah kebutuhan kantor.
- e. Setelah Surat Permintaan Pembayaran terbit, Kasubag Perencanaan dan Keuangan selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran yang telah di buat oleh bendahara.
- f. Setelah Surat Permintaan Pembayaran di verifikasi, selanjutnya Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat Surat Perintah Membayar (SPM), kemudian diajukan ke Pengguna Anggaran (Camat) untuk di sahkan.
- g. Selanjutnya Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) di ajukan ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk di verifikasi kembali kemudian di approve untuk dibuatkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Setelah Surat Perintah Pencairan Dana selesai selanjutnya di paraf oleh Kasubag Akuntansi dan Kepala Bidang Akuntansi, kemudian di tanda tangani oleh Kepala Badan Keuangan kemudian di setor ke Kas Daerah untuk di input bahwasanya ada dana yang akan di cairkan sejumlah nominal yang tertera di Surat Perintah Pencairan Dana melalui rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Bendahara melakukan pencairan dana.

4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Bendahara akan membuat kwitansi pembelanjaan sesuai dengan transaksi dan kejadian keuangan yang digunakan untuk pembuatan bukti transaksi. Bendahara membuat Surat Pertanggung Jawaban berdasarkan bukti transaksi. Surat Pertanggung Jawaban yang telah dibuat oleh bendahara diajukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan untuk disesuaikan dengan kegiatan. Pejabat Penatausahaan Keuangan akan membuat usulan pelaporan Surat Pertanggung Jawaban untuk diberikan kepada bendahara kembali. Bendahara membuat laporan bulanan atau akhir tahun. Setelah selesai laporan diberikan kepada Camat untuk disahkan. Laporan yang telah disahkan diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menjadi laporan keuangan akhir tahun anggaran yang disampaikan Bupati Kepada DPRD melalui Sidang DPRD sebagai representasi masyarakat.

5. KESIMPULAN

Pengelolaan administrasi keuangan pada kantor Camat Blimbing melewati beberapa prosedur dimulai dengan perencanaan yang meliputi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana kerja anggaran (RKA), Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), pengumpulan surat pertanggungjawaban (SPJ) dan menginputnya ke Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) lalu membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) Administratif dan Fungsional, kemudian pembuatan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), lalu membuat Surat Permintaan Membayar (SPM) dan diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk di buat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang menjadi dasar pencairan dana kantor Camat Blimbing, kemudian membuat laporan akhir tahun berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual. Akan tetapi realisasi anggaran pada Kantor Kecamatan Blimbing belum optimal di sebabkan oleh kurangnya Sumber Daya manusia secara kualitas sehingga percepatan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian laporan pertanggung jawaban kegiatan belum optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Halim, & Sarwoko. (2019). *Manajemen keuangan: Dasar-dasar pembelanjaan perusahaan*. BPFPE.
- Armereo, C., dkk. (2020). *Manajemen keuangan*. CV Budi Utama.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. Gadjah Mada University Press.
- Fahmi, I. (2014). *Manajemen keuangan perusahaan dan pasar modal*. Mitra Wacana Media.
- Fuad, M., Christin, H., Nurlela, Sugiarto, & Paulus, Y. E. F. (2020). *Pengantar bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Lovelock, C., & Wirtz, J. (2011). *Services marketing: People, technology, strategy* (7th ed.). Pearson Education.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Andi Offset.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rangga, Y., dkk. (2020). *Penganggaran sektor publik*. Penerbit Salemba Empat.
- Sartono, A. (2020). *Manajemen keuangan: Teori dan aplikasi* (4th ed.). BPFPE.
- Sasongko, C., & Parulian, S. (2020). *Anggaran*. Salemba Empat.
- Sinambela, L. P. (2018). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Bumi Aksara.
- Sinurat, M. (2018). *Akuntansi keuangan daerah*. UPP STIM YKPN.
- Subramanyam, K. R. (2019). *Analisis laporan keuangan* (11th ed.). Salemba Empat.
- Suhardi. (2019). *Penganggaran perusahaan*. Gava Media.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Analisis laporan keuangan: Teori, aplikasi, dan hasil penelitian*. Pustaka Baru Press.
- Sutrisno. (2012). *Manajemen keuangan: Teori, konsep dan aplikasi*. Ekonisia.
- Sutrisno. (2020). *Manajemen keuangan: Teori, konsep dan aplikasi* (Edisi revisi). Ekonisia.
- Yusanti, R. D. (2020). Pengelolaan keuangan keluarga secara efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 45–54.